

RESEPSI SAstra MAHASISWA TERHADAP PUISI ANTIKORUPSI DALAM ANTOLOGI *PUISI MENOLAK KORUPSI 6*

STUDENT LITERATURE RECEPTION OF ANTI-CORRUPTION POETRY IN ANTOLOGY PUISI MENOLAK KORUPSI 6

Andi Wicaksono

IAIN Surakarta

Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
Jawa Tengah 57168

Pos-el: bijakmanyar@gmail.com

*) Naskah diterima: 8 Juli 2020; direvisi: 8 Juli 2020; disetujui: 27 Oktober 2020

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan resepsi sastra mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dimuat di dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah*. Prosedur penelitian yang digunakan untuk melihat aspek resepsi estetik ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan resepsi sastra secara eksperimental. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa resepsi sastra mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dimuat di dalam buku antologi puisi tersebut secara garis besar sudah sesuai dengan maksud penulisan dan penerbitannya. Adapun tolok ukur kesesuaian resepsi estetis tersebut dilihat dari aspek pemahamannya, kelayakan karya yang dimuat sebagai puisi yang baik, sikap responden terhadap ide-ide yang disampaikan dalam puisi, penentuan sasaran pembacanya, serta peran antologi puisi dan gerakan sastrawan menolak korupsi terhadap pemberantasan korupsi.

Kata kunci: *resepsi sastra, mahasiswa, puisi, antikorupsi*

Abstract

The purpose of this article is to describe and explain about the literary reception of students about anticorruption poems contained in Antologi Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah. The research procedure used to look at this aesthetic reception aspect is a qualitative descriptive method. The approach used in this study is an experimental reception approach. Based on the analysis that has been done, the results are obtained that the students' literary reception on anticorruption poems contained in the poetry anthology book is broadly following the purpose of their writing and publication. The aesthetical appropriateness benchmarks are seen from the aspect of understanding, the appropriateness of works published as good poetry, the respondent's attitude to the ideas expressed in poetry, the determination of the target audience, and the anthology role of poetry and the literary movement against corruption.

Keywords: *literary reception, students, poetry, anti-corruption*

PENDAHULUAN

Kesastraan Indonesia modern dari masa ke masa terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini tampak salah satunya dari pemilihan tema yang diangkat secara garis besar yang senantiasa sejalan dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masanya. Sebagai contoh, pada masa Balai Pustaka yang kental dengan nota rinkesnya akan berbeda dengan Pujangga Baru yang mulai nasionalistik. Pun akan berbeda dengan Angkatan Jepang dan '45 yang mulai mengangkat tema revolusi dalam karya-karyanya (Mujiyanto & Fuady, 2014).

Pada era pascareformasi, muncullah pergerakan yang diinisiasi oleh sastrawan Sosiawan Leak dengan tajuk Gerakan Puisi Menolak Korupsi yang bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Gerakan ini kemudian menghasilkan setidaknya enam buku antologi puisi dalam kurun waktu dari tahun 2013 hingga 2017. Dari keenam buku tersebut terhimpunlah ratusan karya.

Gerakan ini tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan, dalam sepanjang sejarah kesastraan Indonesia modern pada kenyataannya belum pernah ada gerakan secara kolektif untuk mengangkat tema antikorupsi. Meskipun jika dirunut, terdapat karya-karya sastra yang mengangkat tema antikorupsi, tetapi itu hanya sebatas langkah individual.

Hal ini terbukti dari hasil riset dari Indrastuti yang menyatakan bahwa sebenarnya puisi-puisi yang bertema antikorupsi sudah ada sejak sebelum gerakan PMK ini digagas. Beberapa nama besar penyair Indonesia yang vokal dalam menyuarakan kampanye antikorupsi pun disebut dalam riset tersebut, seperti Taufik Ismail, A. Musthofa Bisri, WS Rendra, Remi Sylado, Wiji Thukul, hingga Sujiwo Tejo (Indrastuti, 2019). Namun, sekali lagi mereka menulis puisi antikorupsi itu tidak dengan diawali

kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengangkat tema tersebut, apalagi dalam sebuah gerakan melawan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pergerakan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Di sisi lain, kampanye antikorupsi yang terus digaungkan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal ini yang digawangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dirasa masih kurang optimal. Terkhusus, kurang tereksplorasinya penggalakan pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan. Hingga saat ini, nilai-nilai penting pendidikan antikorupsi yang seharusnya disampaikan pada saat pembelajaran masih bersifat global dan terintegrasi dalam pendidikan karakter. Hal ini disebabkan, lembaga ini baru secara intensif menggarap kampanye antikorupsi dalam bidang pendidikan pada tahun 2012 (Waluyo, 2016).

Hal tersebut membuat pemberantasan korupsi menjadi sebuah tantangan besar bagi proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberantasan praktik korupsi di berbagai lini kehidupan pun menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Segala praktik kecurangan dan ketidakjujuran hendaklah dihilangkan di ranah ini, di sisi lain penanaman pendidikan karakter terus dilakukan.

Dalam dunia pendidikan, terdapat satu hasil riset karya Harmanto yang menghasilkan sebuah temuan bahwa budaya islami ternyata menjadi satu instrumen penting dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi. Tentunya, temuan ini cukup menarik, karena salah satu usaha untuk menanamkan budaya islami ini tidak hanya berupa konsep, tapi dalam bentuk keteladanan konsistensi dalam mematuhi peraturan dari para pengajarnya (Harmanto, 2012).

Pun demikian dengan riset karya Asroni dan Yusup yang meneliti perihal penanaman nilai-nilai antikorupsi di dunia pesantren. Hasil penelitian mereka senada dengan karya Harmanto yang menyatakan bahwa sangat diperlukan rekonstruksi sistem pendidikan pesantren dalam hal penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pendidikan tersebut. Hal ini menandakan, bahkan dalam lingkungan pendidikan keagamaan Islam pun pendidikan antikorupsi masih belum tereksplorasi secara optimal. Maka dari itu, dalam konteks pembelajaran tersebut diperlukan peran ulama dalam merekonstruksinya ke dalam lingkungan pesantren (Asroni & Yusup, 2014).

Di samping itu, riset tentang penanaman pendidikan antikorupsi di dunia kampus masih sangatlah sedikit. Penelitian terbaru misalkan ditulis oleh Ulya, dkk. yang meneliti tentang muatan pendidikan antikorupsi pada mata kuliah Pengkajian dan Apresiasi Puisi di lima perguruan tinggi di Jawa Tengah dan DIY. Salah satu hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa nilai pendidikan antikorupsi yang diinternalisasikan pada mata kuliah tersebut masih bersifat umum dan belum secara konkret mengarah pada nilai antikorupsi (Ulya, Wardani, & Mujiyanto, 2016b).

Gayut dengan hasil riset di atas, pun demikian atmosfer pembelajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, khususnya di IAIN Surakarta. Sepanjang pengamatan awal yang saya lakukan, internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada lingkungan kampus pun masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun bukan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran, internalisasi pendidikan antikorupsi saya rasa sangat penting untuk ditanamkan, baik dalam situasi formal dalam pembelajaran maupun informal. Adapun salah satu cara internalisasi yang

bisa diterapkan dalam dunia kampus adalah melalui pengkajian kesastraan, terutama puisi.

Bagi para penulisnya, puisi merupakan salah satu kendaraan untuk mengekspresikan pendapatnya terhadap suatu fenomena yang terjadi, salah satunya adalah fenomena korupsi yang marak dipraktikkan di Indonesia. Di sisi lain, seperti yang telah dipahami bersama bahwa sastra merupakan media alternatif dalam penanaman nilai-nilai moralitas dan pendidikan karakter kepada anak jika dipahami secara baik. Dalam riset karya Ulya, dkk. misalkan, ditemukan sebuah hasil penting bahwa terdapat banyak sekali kandungan metafora dalam puisi-puisi antikorupsi yang dituliskan oleh para sastrawan. Dari sekian banyak puisi yang mereka teliti, metafora kehewan-an dan pengabstrakan merupakan dua metafora tertinggi yang sering muncul dalam karya mereka (Ulya, Wardani, & Mujiyanto, 2016a). Tentunya kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan baru yang layak untuk direnungi, seberapa jauh kemudian bahasa-bahasa permisalan tersebut dapat dicerna oleh pembacanya, khususnya para mahasiswa. Oleh karena itu, kemudian saya merasa tergugah untuk meneliti fenomena ini dalam sebuah kajian resepsi sastra. Adapun karya puisi yang menjadi bahan kajian adalah beberapa puisi yang dimuat dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi* 6.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dari para responden terhadap puisi dalam antologi PMK 6, penilaian responden perihal kelayakan karya yang dimuat dalam antologi tersebut, sikap responden terhadap ide yang disampaikan dalam puisi, sasaran pembaca, peran antologi puisi tersebut terhadap pemberantasan korupsi, dan opini mereka tentang perlunya gerakan sastrawan menolak korupsi. Dengan demikian, berangkat

dari keenam fokus penelitian di atas memberikan gambaran tentang kualitas dan peran dari antologi puisi tersebut terhadap khazanah pendidikan antikorupsi, khususnya di perguruan tinggi.

LANDASAN TEORI

Resepsi sastra yang kemudian juga dikenal dengan istilah estetika resepsi merupakan salah satu pendekatan untuk mengkaji karya sastra melalui sudut pandang pembacanya. Salah satu teori pengkajian sastra yang berkembang pesat pada masa postrukturalisme ini lebih menekankan pada penerimaan atau penyambutan pembaca terhadap suatu karya sastra (Ratna, 2004). Adapun pendekatan resepsi sastra menjadi begitu penting dalam kajian kesastraan, karena interpretasi karya sastra pada kenyataannya tak bisa hanya dicukupkan pada perspektif penulis. Pembaca pun memiliki peran dalam mengonkretkan karya (Junus, 1985).

Secara umum, bentuk resepsi estetik pembaca terhadap suatu karya sastra bisa berupa komentar, baik lisan maupun tulis. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bisa juga dengan pembacaan sajak atau transformasi gagasan yang telah penulis sampaikan dalam karyanya (Pradopo, 2007). Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas, dengan berbagai kemungkinan penggunaan.

Kehadiran resepsi sastra ternyata memberi pengaruh bahkan telah mengubah paradigma dalam penelitian sastra. Satu keunikan utama yang membedakan pendekatan resepsi sastra dengan pendekatan yang lain adalah perihal penekanan dan fokus utamanya. Sebelum kemunculan resepsi sastra, tekanan diberikan kepada teks. Lebih lanjut, untuk kepentingan teks ini biasanya seorang peneliti merujuk kepada penulis (Junus, 1985).

Adapun resepsi merupakan pendekatan yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Resepsi sastra merupakan penelitian yang memfokuskan perhatian kepada pembaca, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra, sehingga memberikan reaksi terhadap teks tersebut. Dalam hal ini, pembaca juga mempunyai tanggapan atau reaksi terhadap teks. Terdapat dua macam tanggapan, yaitu tanggapan aktif dan pasif. Pasif maksudnya bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya-karya sastra atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Tanggapan yang bersifat aktif adalah bagaimana pembaca dapat “merealisasikan” karya sastra tersebut.

Dalam penelitian resepsi dibedakan menjadi dua bentuk, a) resepsi secara sinkronis, dan b) resepsi secara diakronis. Bentuk pertama meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Sekelompok pembaca, misalnya, memberikan tanggapan, baik secara sosiologis maupun psikologis terhadap sebuah novel. Bentuk resepsi yang lebih rumit adalah tanggapan pembaca secara diakronis, sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis memerlukan data dokumenter yang memadai.

Peranan pembaca, seperti disebutkan pada awal pemaparan benar-benar merupakan pembalikan paradigma secara total. Pembaca yang tidak tahu tentang proses kreatif pengarang diberikan fungsi utama, sebab pembacalah yang menikmati, menilai, dan memanfaatkan karya sastra. Sebaliknya, penulis sebagai asal usul karya harus terpinggirkan, bahkan dianggap sebagai anonimitas.

Oleh karena itulah, dalam kaitannya dengan pembaca, berbeda dengan penulis, timbul berbagai istilah, seperti: pembaca

eksplisit, pembaca implisit, pembaca maha-tahu, dan sebagainya. Pembaca implisit atau pembaca yang sebetulnya disapa oleh pengarang ialah gambaran mengenai pembaca yang merupakan sasaran si pengarang dan yang terwujud oleh segala petunjuk yang kita dapat dalam teks. Pembaca eksplisit adalah pembaca kepada siapa suatu teks diucapkan.

Penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam tiga pendekatan, yakni (1) pendekatan resepsi sastra secara eksperimental; (2) penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra; (3) penelitian resepsi sastra secara intertekstual. Adapun jika dikerucutkan pada penelitian ini, saya memilih untuk menggunakan pendekatan eksperimental karena responden penelitian ini adalah para mahasiswa yang telah membaca buku antologi puisi *Puisi Menolak Korupsi 6*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di IAIN Surakarta, tepatnya pada mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia yang telah mendapatkan mata kuliah Kajian Apresiasi Puisi. Adapun alasan mengapa mengambil mahasiswa pada jurusan tersebut, karena secara keilmuan dan kemampuan mengapresiasi puisi mereka setidaknya cukup menguasai. Hal itu disebabkan mereka telah mendapatkan mata kuliah perihal kemampuan bersastra, terkhusus kajian apresiasi puisi. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan resepsi sastra untuk menganalisis semua data hasil penelitian yang telah dikumpulkan.

Terdapat tiga sumber data penting yang dijadikan sebagai sasaran penggalan dan pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini. Sumber data tersebut meliputi:

1. Responden, dalam penelitian ini menggunakan responden mahasiswa Jurusan

Tadris Bahasa Indonesia (TBI) IAIN Surakarta yang berjumlah enam orang. Tentunya tidak semua mahasiswa TBI bisa menjadi responden karena disyaratkan mereka adalah mahasiswa yang telah tuntas menempuh mata kuliah kajian Apresiasi Puisi yang diajarkan pada semester lima. Selain itu, tentunya mereka juga sudah pernah membaca buku antologi *Puisi Menolak Korupsi 6*.

2. Informan, dalam penelitian ini keberadaan informan bertujuan untuk triangulasi sumber data. Adapun informan yang dimaksud adalah Sosiawan Leak selaku penggagas gerakan Puisi Menolak Korupsi yang telah menerbitkan tujuh antologi puisi menolak korupsi.
3. Dokumen yang berupa naskah antologi *Puisi Menolak Korupsi 6* dan hasil kuesioner kepada mahasiswa.

Pengumpulan data yang diterapkan sebagai alat mengumpulkan data secara lengkap dan akurat sehubungan dengan masalah yang diteliti secara umum ada dua, yaitu:

1. Kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tanggapan dari mahasiswa tentang hasil resepsi sastra mereka terhadap buku antologi *Puisi Menolak Korupsi 6*. Hasil kuesioner ini kemudian dianalisis untuk diukur sampai sejauh mana mereka memahami buku antologi puisi tersebut.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan tentang penyusunan buku antologi *Puisi Menolak Korupsi 6* secara khusus dan gerakan PMK secara umum. Wawancara mendalam (*in depth interview*) ini digunakan untuk triangulasi sumber data, yaitu melakukan cek ulang terhadap hasil resepsi sastra mahasiswa sehingga dapat

diketahui apakah pemahaman mahasiswa sudah sesuai atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Antologi Puisi *Menolak Korupsi 6*

Antologi *Puisi Menolak Korupsi 6* adalah kumpulan puisi dari para sastrawan seluruh Indonesia yang bertemakan antikorupsi. Antologi puisi ini mengambil tajuk *Membedah Korupsi Kepala Daerah*. Sesuai dengan tajuk tersebut, sebagian besar puisi-puisi yang dimuat di dalamnya mengangkat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ratusan puisi karya dari 200 orang penyair Indonesia ini sebagian besar berisi kritikan terhadap potret pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari proses pemilihan umumnya hingga skandal korupsi yang dilakukan oleh mereka ketika menjabat. Adapun jika dilihat dari objek yang dituju dalam puisi, dapat terbagi menjadi tiga hal. Pertama, puisi yang ditujukan secara khusus kepada orang tertentu. Kedua, puisi yang ditujukan secara umum kepada semua pelaku korupsi di lingkup pemerintah daerah. Ketiga, puisi yang memotret masa-masa pemilihan kepala daerah.

Pada kategori pertama sebagai contoh, puisi yang berjudul *Ibu Ratu* karya Adawiyah Dahlan Al-Arsyad. Walau tak disampaikan secara langsung, puisi ini memotret fenomena korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Banten yang notabene adalah gubernur wanita Indonesia pertama. Selain itu, ada juga puisi karya Rizka Amalia yang justru secara gamblang menuliskan judul kecil *eks Bupati Bangkalan* di bawah judul utamanya *Untuk Apa?.* Hanya saja, puisi yang termasuk dalam kategori ini sangatlah sedikit, mungkin dikarenakan mengandung risiko yang tidak

kecil juga karena sudah menasar pada orang tertentu.

Adapun untuk kategori kedua, tipe puisi seperti ini banyak diangkat oleh penulis. Sajak-sajak yang masuk dalam kategori ini tidak menggambarkan secara khusus skandal korupsi yang dilakukan oleh orang tertentu, tetapi mencoba memaparkan kondisi secara umum negeri ini akibat ulah para koruptor. Sebagai contoh, puisi karya Makhfud Syawaludin yang berjudul *Negeri Negeri*. Puisi yang terdiri atas enam bait ini secara lugas menekankan perihal “*Gubernur, bupati, hingga pejabat korupsi*” (Syawaludin, 2017). Selain itu, terdapat juga puisi karya Pekik Sasinilo yang berjudul *Melihat Kenyataan*. Puisi tersebut menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat bahwa telah “*Berderet panjang-panjang/Pasukan berompi oranye mengular*” (Sasinilo, 2017). Tak lain lagi, penulis sejak awal menekankan bahwa telah banyak pelaku korupsi yang telah ditangkap yang kebanyakan adalah para kepala daerah.

Terakhir, kategori ketiga mencoba menjelaskan perihal pilkada yang secara tak langsung sangat berkaitan dengan kepala daerah. Sebagai contoh, puisi karya Eko Windarto yang berjudul *Musim Kampanye* dan karya RD Kedum yang berjudul *Janji*. Kedua puisi tersebut menjelaskan perihal gambaran umum yang terjadi ketika rangkaian perhelatan pilkada berlangsung, bagaimana kemudian para kandidat kepala daerah tersebut mengumbar janji kepada masyarakat agar bisa terpilih menjadi kepala daerah.

Berdasarkan data hasil wawancara saya dengan penggagas gerakan Puisi Menolak Korupsi sekaligus editor buku *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah*, yaitu Sosiawan Leak, secara umum sajak-sajak yang dimuat di dalam buku antologi ini ditulis dengan menggunakan bahasa

yang lugas, walaupun terdapat juga puisi yang disampaikan dengan bahasa figuratif. Besar kemungkinan, pemilihan diksi yang seperti itu bertujuan agar mudah dipahami oleh khalayak luas. Selain itu, meskipun kebanyakan berisi kritikan, pada dasarnya gerakan PMK ini tujuannya juga untuk memberi edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Resepsi Sastra Responden terhadap Antologi Puisi Menolak Korupsi 6

Pencarian dan pengumpulan data perihal resepsi sastra mahasiswa terhadap antologi *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah* ini dilakukan sejak tanggal 1 April 2019. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin dan sekaligus melakukan wawancara kepada penggagas gerakan PMK, yaitu Sosiawan Leak. Pada saat itu, sastrawan tersebut menyambut baik niat saya untuk meneliti buku PMK 6 sebab masih sedikit peneliti yang mengangkat buku itu ke dalam penelitiannya.

Pada saat itu, tepatnya di kediaman Sosiawan Leak yang bertempat di Jebres Mojosongo Surakarta, saya melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada lelaki tersebut perihal gerakan PMK yang salah satunya adalah penerbitan buku PMK 6. Wawancara ini saya lakukan untuk mencari data awal penelitian sekaligus sebagai pembanding (*triangulasi sumber data*) hasil dari kuesioner resepsi sastra mahasiswa terhadap buku PMK 6 yang kemudian saya lakukan selanjutnya.

Usai melakukan wawancara, barulah pada beberapa hari selanjutnya saya mulai mencari dan meminta persetujuan kepada beberapa mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta untuk saya jadikan responden penelitian. Syarat untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang utama mereka sudah membaca buku antologi PMK 6. Selain itu, mereka adalah

mahasiswa yang telah menuntaskan mata kuliah Kajian Apresiasi Puisi yang diajarkan pada semester kelima. Oleh karena itu, responden yang saya peroleh adalah para mahasiswa yang pada saat itu tengah mencapai semester keenam perkuliahannya.

Pada awalnya, terkumpul sepuluh orang mahasiswa yang menyatakan siap untuk menjadi responden. Hanya saja, dari kesepuluh orang tersebut akhirnya tersisa enam mahasiswa yang positif menjadi responden. Kemungkinan besar, pengurangan jumlah responden ini disebabkan pada masa pencarian data tersebut bertepatan dengan jelang akhir perkuliahan sehingga mahasiswa mulai disibukkan dengan persiapan ujian akhir semester. Ditambah lagi, usai rangkaian ujian akhir semester genap tahun ajaran 2018/2019 itu diikuti dengan libur lebaran dan jeda akhir semester, yang pada saat itu mereka mulai disibukkan dengan persiapan Kuliah Kerja Nyata. Adapun keempat mahasiswa yang batal menjadi responden tersebut disebabkan saya kehilangan kontak dengan mereka, karena pengumpulan data resepsi sastra mahasiswa baru saya lakukan saat pasca-libur lebaran yang notabene adalah jeda perkuliahan antara semester genap 2018/2019 dan gasal 2019/2020.

Atas dasar berbagai kondisi yang telah saya paparkan sebelumnya itulah, kemudian saya menjadikan teknik kuesioner sebagai teknik pengumpulan data resepsi sastra mahasiswa. Format kuesioner itu pun saya susun dengan menggunakan *Google Form* yang berbasis daring sehingga memudahkan para responden untuk mengisinya di mana pun mereka berada (tidak harus tatap muka atau berkumpul di kelas).

1. Hasil kuesioner resepsi sastra mahasiswa

Berikut ini adalah ringkasan hasil kuesioner resepsi mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dilakukan pada

tanggal 26 Juni 2019. Pengisian kuesioner baru dilaksanakan pada tanggal tersebut karena menunggu masa tenang pascaujian akhir semester dan libur Idul Fitri. Adapun detail ringkasan tanggapan mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut Joefansah puisi-puisi dalam buku ini sudah bagus, meskipun pemilihan katanya cenderung biasa saja. Dia juga mengatakan bahwa dirinya memahami isi buku PMK 6. Sebagian karya di dalamnya layak untuk dikatakan sebagai puisi yang baik dengan alasan bahwa makna dan lariknya sangat relevan, serta dapat ditunjukkan kepada semua kalangan. Menurutnya, buku ini memiliki peran dalam kampanye pendidikan antikorupsi untuk memperkuat usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirasanya masih kurang tegas dan disiplin. Uniknya, dia menilai bahwa tidak perlu adanya gerakan sastrawan menolak korupsi dalam khazanah kesastraan Indonesia dengan alasan bahwa puisi-puisi ini sudah cukup untuk menjadi media kritik.

Kedua, Eno. Mahasiswi yang tergabung dalam organisasi Lembaga Pers Mahasiswa ini mengaku cukup memahami isi buku yang mengandung pesan penegakkan hukum harus seadil-adilnya tersebut. Ia juga berpendapat bahwa sebagian besar karya yang berada dalam PMK 6 layak dikatakan sebagai puisi yang baik dengan alasan pemilihan bahasa yang halus dapat dijadikan kritikan dan juga salah satu gerakan menolak korupsi. Berbeda dengan responden pertama, Eno berpendapat bahwa dalam pergerakan kesastraan Indonesia justru perlu diadakan gerakan sastrawan menolak korupsi sebagai bentuk kepedulian terhadap negeri. Hal ini disebabkan, ia melihat sejauh ini

perjuangan negara dalam memberantas korupsi masih kurang maksimal.

Menurut Sururi, mahasiswa yang berasal dari Bojonegoro yang tergabung dalam organisasi IMAGORO (Ikatan Mahasiswa Bojonegoro) ini mengatakan setuju dengan ide-ide yang tertuang dalam buku ini, terdapat pesan kuat dalam puisi tersebut salah satunya adalah keresahan terhadap korupsi semakin masif dan kian terstruktur. Saruri juga menilai bahwa buku ini memiliki peran dalam kampanye anti korupsi, tidak cukup dengan puisi ini saja karena korupsi merupakan musuh bersama, menurutnya diperlukan gerakan sastrawan dalam pergerakan kesastraan Indonesia dalam aksi pemberantasan korupsi. Melihat dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sebatas di permukaan tangan, sidang, fatalnya penegak hukum masih bisa dinego dibelakang (menerima suap).

Siti Aminataz Zuhriyah, merupakan mahasiswi yang aktif dalam berbagai organisasi, ia mengatakan setuju dengan ide-ide dalam puisi Membedah Korupsi Kepala Daerah ini. Menurutnya, sebuah karya dapat dikatakan layak karena semua merupakan ungkapan dari hasil rasa apalagi banyak sajak dan perumpamaan yang dapat dijadikan sindiran bagi mereka (para koruptor). Puisi ini patut ditujukan kepada pejabat dan wakil rakyat. Buku ini juga memiliki peran dalam kampanye pendidikan anti korupsi. Sastrawan sejati tidak akan tinggal diam atas penindasan rakyat yang dilakukan oleh pejabat rakyat. Oleh sebab itu, perlu diadakan gerakan sastrawan menolak korupsi meskipun sudah banyak yang berjuang melawan korupsi tetapi masih banyak yang ditindas, diancam, dan dibunuh. Oleh karena

itu, masih banyak yang berdiam diri dan takut atas ancaman, jika dibandingkan antara yang berjuang dan belum berjuang tentu banyak yang belum berjuang.

Menurut Dika Saputra, mahasiswa jurusan TBI, ia mengatakan setuju dengan ide-ide puisi ini karena buku ini memiliki pesan kuat, yakni merupakan suatu gagasan yang menggugah semangat masyarakat dalam hal memberantas korupsi dengan berbagai cara yang dapat mereka lakukan. Namun, tidak semuanya layak dikatakan sebagai puisi yang baik karena jika dilihat dari struktur badan puisi, terlihat puisi yang kurang menarik karena pemilihan diksinya yang begitu sederhana. Mungkin karena puisi ini dibuat oleh beberapa lapisan masyarakat. Namun, di sisi lain puisi ini mengandung makna yang luar biasa.

Menurut Giyanti, ide-ide dalam puisi tersebut sudah bagus dan memiliki pesan kuat bahwa korupsi adalah perilaku jahanam yang harus kita lawan, jika bukan dari diri kita siapa lagi. Meskipun hanya perbuatan kecil akan memberikan dampak yang besar jika dilakukan bersama-sama karena, korupsi adalah perilaku biadab yang mendzolimi orang lain. Jadi, korupsi harus dibasmi karena menimbulkan penderitaan yang tak bertepi, ujarinya. Menurutnya, puisi ini layak ditunjukkan kepada semua khalayak karena memiliki peran kampanye pendidikan anti korupsi. Selain dalam bentuk puisi, ia juga mengatakan bahwa perlu adanya gerakan sastrawan menolak korupsi karena koruptor adalah musuh semua warga negara Indonesia sehingga siapapun wajib melawannya sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Hingga saat ini, perjuangan negara dalam memberantas korupsi masih minimal sekali seperti main-main dan

kurang serius, contohnya kasus penjara di Suka Miskin yang para koruptor sudah mendekam dibalik jeruji besi masih bisa menggunakan fasilitas mewah dan melakukan penyogokan terhadap penegak hukum. Semuanya tidak adil, sedangkan penjahat yang mencuri karena kelaparan harus merasakan hukuman yang lebih menyakitkan dari koruptor yang kejahatannya lebih berat, pungkasnya.

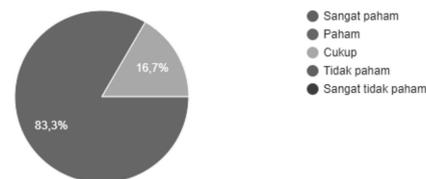
2. Analisis resepsi sastra mahasiswa terhadap Puisi Menolak Korupsi 6

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat ditarik beberapa poin penting. Poin penting tersebut jika dijabarkan akan seperti berikut ini.

a. Pemahaman Mahasiswa terhadap Puisi dalam PMK 6

Apakah Anda memahami isi buku Antologi Puisi Menolak Puisi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah?

6 tanggapan



Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh para responden dapat diperoleh hasil bahwa 83.3% mahasiswa menyatakan paham terhadap isi semua puisi yang berada dalam antologi PMK 6. Sementara itu, sisanya 16.7% menyatakan cukup paham dengan kandungan makna yang disampaikan dalam puisi-puisi tersebut.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sajak-sajak yang dimuat dalam antologi PMK 6 ini termasuk kategori puisi yang mudah dipahami. Hal ini disebabkan oleh diksi yang digunakan cenderung lugas dan jarang yang menggunakan bahasa

figuratif. Di satu sisi, hal ini bisa menjadi sebuah kelebihan sehingga buku ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat awam dibandingkan antologi-antologi puisi lain pada umumnya.

Namun, di sisi lain di mata para akademisi, hal ini bisa memunculkan tanggapan lain. Setidaknya, hal ini telah tercermin dari tanggapan salah satu responden yang mengatakan bahwa dari segi diksi dianggap biasa saja. Walaupun bukan berarti bahwa puisi harus kaya kiasan dan majas sebab pada kenyataannya terdapat pula puisi-puisi yang lugas, tetapi diakui sebagai sebuah karya sastra yang monumental. Hanya saja, kesan biasa ini bisa menjadi sebuah sinyal awal bagi para editor PMK agar ke depan perlu kembali merumuskan tolok ukur sebuah karya laik muat, terutama dalam hal pilihan kata.

Di sisi lain, jika mengacu pada hasil wawancara dengan Sosiawan Leak, niat utama penerbitan buku ini adalah untuk membuat sebuah gerakan kolektif dari para sastrawan dalam bersikap terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, jika lebih mengerucut pada penerbitan PMK 6, buku ini diterbitkan untuk menjadi peringatan kepada para pemimpin daerah yang baru terpilih usai pilkada serentak pada rentang tahun 2016-2018 sehingga secara kematangan karya hingga proses seleksi dan penyuntingan naskah bisa menjadi sorotan.

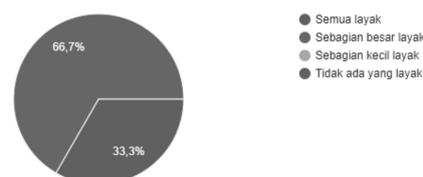
Meski demikian, kelebihannya secara topik yang diangkat karya-karya puisi yang termuat di dalam PMK 6 sangat menitik dan menyasar kepada objek kajian. Bahkan, gerakan nonprofit ini sudah beberapa kali diundang FGD (*focus group discussion*) oleh lembaga antikorupsi negara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengaggas kampanye antikorupsi

di Indonesia. Tentunya dari hal ini dapat disimpulkan bahwa karya-karya dalam PMK 6 telah mendapat pengakuan dari lembaga KPK, setidaknya karena ketersampaian pesan yang terkandung di dalam puisi-puisinya.

b. Kelayakan Karya yang Dimuat sebagai Puisi yang Baik

Apakah semua karya di dalamnya layak dikatakan sebagai puisi yang baik?

6 tanggapan



Berhubungan dengan poin sebelumnya, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi editor dan penggagas PMK untuk bisa menghadirkan puisi anti-korupsi yang mudah dipahami khlayak dan tetap layak disebut sebagai karya sastra yang baik. Hal ini tercermin dalam hasil kuesioner yang telah diisi bahwa 66,7% responden menyatakan sebagian besar layak disebut sebagai puisi yang baik. Jika mengacu pada data ini, dapat juga dikatakan bahwa ada sebagian kecil karya yang menurut mereka tidak termasuk puisi yang baik.

Adapun beberapa catatan kritis para responden yang dapat dijadikan acuan perihal apa saja menjadikan sebagian kecil karya tersebut dianggap kurang layak adalah pada faktor diksi yang biasa dan struktur badan puisinya. Hal ini masih bisa dimaklumi karena besar kemungkinan para penulisnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan mereka tidak berangkat dari dunia kesastraan.

Meski demikian, 33,3% responden menyatakan bahwa semuanya layak dikatakan sebagai sebuah karya sastra yang baik. Adapun beberapa alasannya

adalah dari segi relevansinya, bahasanya yang tidak vulgar (padahal kebanyakan isi dari puisi-puisi ini adalah kritikan tajam kepada pemerintah), sangat kaya majas, dan yang terakhir puisi-puisi ini sangat bebas keberpihakan politik. Hal ini tergambar dalam beberapa komentar para responden seperti berikut ini:

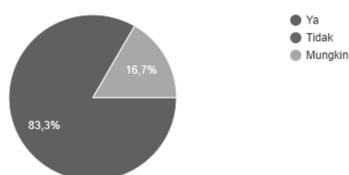
“Jika dilihat dari struktur badan puisi, terlihat terdapat puisi yang kurang menarik karena pemilihan diksi dll. yang terlihat begitu sederhana. Mungkin karena puisi tersebut dibuat oleh beberapa lapisan masyarakat. Namun di sisi lain, jika dilihat dari makna dan maksud puisi, dapat dikatakan luar biasa,” (Dika Saputra).

Mengacu pada apa yang dikatakan oleh salah satu responden di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa puisi yang biasa saja, tetapi ia memberi catatan penting bahwa makna yang terkandung pada karya tersebutlah yang menjadikan layak dikatakan sebagai puisi yang baik. Barangkali maksud dari puisi biasa ini adalah diksinya yang tidak selalu mengandung bahasa figuratif dan memang hal ini sah saja. Hal ini pun diperkuat oleh responden yang lain.

c. Sikap Responden terhadap Ide-Ide yang Disampaikan dalam Puisi

Apakah Anda setuju terhadap ide-ide puisi yang tertulis di dalam buku tersebut?

6 tanggapan



Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dapat disimpulkan bahwa ide-ide antikorupsi yang disampaikan

dalam antologi PMK 6 secara umum bisa diterima oleh responden. Hal ini tampak dari diagram di atas yang menggambarkan bahwa sebanyak 83,3% mahasiswa setuju dengan ide-ide tersebut.

Kesepakatan terhadap ide puisi ini menjadi sebuah angin segar terhadap kampanye antikorupsi, khususnya dalam dunia pendidikan. Besar harapannya, temuan awal data ini bisa ditindaklanjuti ke dalam penelitian yang lebih lanjut perihal efektivitas pemanfaatan puisi antikorupsi terhadap internalisasi pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan formal.

Sebagai gambaran, berikut ini adalah beberapa apresiasi mereka perihal kedalaman makna yang terkandung di dalam PMK 3, “Buku ini merupakan suatu gagasan untuk menggugah semangat masyarakat dalam hal memberantas korupsi dengan cara yang dapat mereka lakukan,” (Dika Saputra).

Senada juga dengan pernyataan responden yang lain:

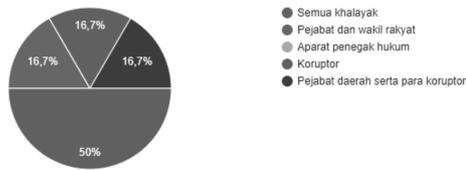
“Korupsi adalah perilaku jahanam yang harus kita lawan. Jika bukan dari diri kita, siapa lagi. Meskipun hanya perbuatan kecil akan memberikan dampak yang besar jika dilakukan bersama-sama. Korupsi adalah perilaku yang menzalimi orang lain, Jadi, harus dibasmi karena mengakibatkan penderitaan yang tiada bertepi,” (Giyanti).

Setidaknya berdasarkan kedua tanggapan di atas dapat diperoleh gambaran resepsi mahasiswa yang sudah cukup baik. Mereka sadar melalui buku PMK 6 diharapkan bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat perihal bahaya korupsi.

d. Sasaran Pembaca

Menurut Anda, buku ini ditulis untuk ditujukan kepada siapa?

6 tanggapan



Para responden ternyata tampak berbeda pendapat dalam menjawab sasaran pembaca dari buku antologi puisi PMK 6 ini. Lima puluh persen, dengan kata lain, separuh dari mereka menjawab bahwa buku ini ditujukan kepada semua kalangan masyarakat. Adapun sisanya menjawab secara lebih spesifik, satu responden menjawab ditujukan khusus kepada pejabat dan wakil rakyat, satu lagi menjawab ditujukan khusus kepada koruptor, dan seorang terakhir menjawab pejabat daerah serta pada koruptor.

Jika dianalisis secara mendalam, semua tanggapan tersebut memang sangat beralasan. Hal ini disebabkan, semua puisi yang dimuat di dalam buku ini berisi kritikan. Meski demikian, lebih menyoroti para pelakunya. Adapun khusus untuk penegak hukumnya, kurang begitu tereksplorasi. Karena itulah, maka tidak ada yang menjawab secara spesifik ditujukan kepada aparat penegak hukum.

Jika kembali pada hasil wawancara dengan Sosiawan Leak, dia menjelaskan bahwa meskipun tema PMK 6 ini adalah Membedah Korupsi Kepala Daerah, tetapi buku kumpulan puisi ini ditujukan kepada semua khalayak. Pemilihan tema tersebut hanyalah fokus pembahasan tidak sampai menjadi pembatasan sasaran pembaca.

Lebih dari itu, Sosiawan Leak bahkan juga menjelaskan bahwa puisi-

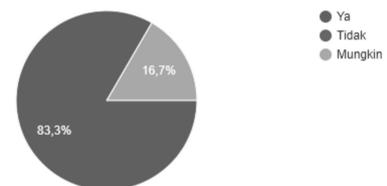
puisi yang termuat di dalam PMK 6 sangat kecil kemungkinan memberikan efek jera kepada koruptor. Hal ini disebabkan, tipikal koruptor yang cenderung tak peduli terhadap berbagai norma. Walaupun sudah diancam dengan dalil agama, beberapa peraturan tegas dari pemerintah, bahkan pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat, pada kenyataannya praktik korupsi tetap terus ada.

Oleh karena itu, sebenarnya PMK 6 ini diterbitkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas secara berkesinambungan. Melalui kegiatan yang terus didengungkan ini harapannya kelak akan tumbuh masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi sehingga ketika telah tiba masa mereka berkiprah di masyarakat dan pemerintahan, mereka benar-benar akan mengatakan tidak untuk praktik korupsi. Adapun untuk koruptor, biarlah diserahkan penanganannya kepada pemerintah.

e. Peran Buku PMK 6 terhadap Pemberantasan Korupsi

Menurut Anda, apakah buku ini memiliki peran dalam kampanye pendidikan antikorupsi?

6 tanggapan



Para responden mayoritas menjawab bahwa buku antologi puisi PMK 6 memiliki peran dalam kampanye pendidikan antikorupsi. Hal ini terbukti 83,3% menjawab setuju secara meyakinkan. Sementara itu, 16,7% responden (satu orang) masih ragu-ragu dengan memilih jawaban mungkin.

Meskipun hanya satu orang, hal ini perlu diperhatikan para sastrawan,

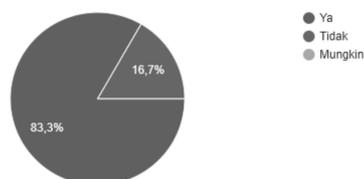
terkhusus mereka yang tergabung dalam PMK. Ketersampaian ide, kemudahan karya untuk dipahami, kelayakan karya, dan berbagai aspek lainnya tetap harus menjadi tolok ukur yang harus diperhatikan dalam menyaring karya yang masuk ke meja redaksi sehingga kualitas karya yang diterbitkan tetap terjaga.

Meski demikian, bisa jadi pula ada alasan lain mengapa sebagian kecil responden menjawab ragu-ragu dengan pertanyaan tersebut. Sayangnya, saya belum menindaklanjuti temuan tersebut.

f. Perlunya Gerakan Sastrawan Menolak Korupsi

Dalam pergerakan kesastran Indonesia apakah perlu ada gerakan sastrawan menolak korupsi?

6 tanggapan



Seperti halnya poin sebelumnya, perihal peran buku PMK 6 terhadap pendidikan antikorupsi, mayoritas responden juga menjawab bahwa gerakan sastrawan menolak korupsi dianggap perlu ada dalam pergerakan kesastran Indonesia. Hal ini tampak dari hasil kuesioner yang mengatakan bahwa 83,3% peserta memilih jawaban ya sebagai bentuk persetujuan.

Meski demikian, satu orang responden menjawab tidak perlu. Jika dirunut dari alasan yang dia sebutkan bahwa dengan berkarya saja itu sudah cukup, sehingga tidak perlu ada gerakan karena secara umum gerakan dari sastrawan adalah dengan menuliskan karya. Tentu pendapat ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Seperti yang telah jamak diketahui, gerakan sastrawan menolak korupsi dalam sepanjang sejarah kesastran Indonesia modern adalah sebuah gerakan baru yang bersifat kolektif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sosiawan Leak selaku penggagas gerakan PMK. Seperti yang telah disampaikan dalam wawancara beberapa waktu yang lalu bahwa kegiatan PMK tidak hanya menerbitkan buku, tetapi juga *road show* pembacaan dan diskusi puisi anti-korupsi.

Setidaknya melalui dua kegiatan utama tersebut, diseminasi gagasan pendidikan antikorupsi bisa disampaikan secara luas. Hanya saja kemudian muncul pertanyaan, bukankah kegiatan ini bisa dilakukan oleh perorangan? Sejauh mana efektivitas gerakan kolektif kesastran ini memengaruhi bergulirnya opini masyarakat hingga menjadi kebijakan dari pemangku kepentingan?

Sosiawan Leak menjelaskan, melalui gerakan PMK ini setidaknya terdapat beberapa keuntungan. Pertama, dipandang dari segi penyampaian aspirasi yang lebih cepat tersampaikan karena ini mewakili suara kolektif bukan perseorangan. Kedua, karena ini adalah suara kolektif maka akan dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan. Sebagai contoh, ternyata Leak selaku penggagas PMK sendiri telah beberapa kali diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan diskusi-diskusi terbatas perihal kampanye antikorupsi melalui media sastra.

Dengan demikian, gerakan sastrawan menolak korupsi seperti PMK ini ternyata cukup signifikan dalam membangun opini masyarakat, terkhusus dalam kampanye antikorupsi. Disebabkan kerjanya yang bersifat kolektif

sehingga ketersampaiannya akan lebih signifikan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa resepsi sastra mahasiswa terhadap puisi antikorupsi yang dimuat di dalam buku antologi *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah* secara garis besar sudah sesuai dengan maksud penulisan dan penerbitannya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan hasil resepsinya, tetapi persentasenya hanya sedikit dan itu pun masih bisa dimaklumi. Oleh karena itu, saya berharap semoga berangkat dari hasil penelitian ini, buku antologi puisi tersebut perlu untuk lebih dimasyarakatkan dan dijadikan bahan ajar pembelajaran kesastraan Indonesia pada berbagai jenjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni, A., & Yusup, M. 2014. Pesantren and Anti-Corruption Movement: The Significance of Reconstruction of Pesantren Education System for Eradicating Corruption. *Cendekia*, 12(1), 1-13.
- Harmanto. 2012. Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah Berbasis Nilai-nilai Keislaman. *Islamica*, 7(1), 100-122.
- Indrastuti, N. S. K. 2019. Wacana Antikorupsi dalam Puisi Indonesia Modern: Kajian Sosiopragmatik. *Widyaparwa*, 47(1), 92-103.
- Junus, U. 1985. *Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Mujiyanto, Y., & Fuady, A. 2014. *Kitab Sejarah Sastra Indonesia: Prosa dan Puisi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Pradopo, R. D. 2007. *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, N. K. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sasinilo, P. 2017. Melihat Kenyataan. In S. Leak (Ed.), *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah* (pp. 242-243). Yogyakarta: Penerbit Almatara.
- Syawaludin, M. 2017. Negeri Negeri. In S. Leak (Ed.), *Puisi Menolak Korupsi 6: Membedah Korupsi Kepala Daerah* (p. 203). Yogyakarta: Penerbit Almatara.
- Ulya, C., Wardani, N. E., & Mujiyanto, Y. 2016. Metafora dalam Puisi Antikorupsi Karya Penyair Indonesia. *Atavisme*, 19(2), 206-219.
- Ulya, C., Wardani, N. E., & Mujiyanto, Y. 2016. Muatan Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pengkajian dan Apresiasi Puisi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Journal Indonesian Language Education and Literature*, 2(1), 60-75.
- Waluyo, B. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.